

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDISTRIBUSIAN  
BANTUAN SOSIAL SECARA BERKEADILAN  
(Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat di Kecamatan  
Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)**

**Skripsi**

Oleh:

**Muhammad Arnanda**

**NPM 1816021055**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL SECARA BERKEADILAN (STUDI PADA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG TAHUN 2021)**

Oleh

**MUHAMMAD IRNANDA**

Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial secara berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang khususnya untuk Kecamatan Menggala melalui Dinas Sosial telah melaksanakan peran yang signifikan dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan bantuan, mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan bantuan tersebut mencapai penerima yang tepat yang disesuaikan dengan indikator alokasi, regulator dan kesejahteraan.

**Kata Kunci: Bantuan Sosial; Distribusi.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENTS IN DISTRIBUTION SOCIAL ASSISTANCE IN A FAIR WAY (STUDY ON PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE TO COMMUNITIES IN MENGGALA DISTRICT, TULANG BAWANG REGENCY, LAMPUNG IN 2021)**

By

**MUHAMMAD IRNANDA**

The distribution of social assistance to communities must have program coordination starting from the central, provincial and city levels. In this case, data accuracy and good cooperation with all elements of society will guarantee that aid recipients will not be duplicated. The importance of coordination between central and regional governments in distributing social assistance to communities. Coordination is needed so that there is no overlap, especially if there are multiple recipients. The aim of this research is to determine the role of local governments in distributing social assistance fairly. The method used in this research is a qualitative descriptive method which aims to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. Based on the research results, it can be concluded that the Regional Government of Tulang Bawang Regency, especially for Menggala District, through the Social Service, has carried out a significant role in distributing social assistance to the community and is responsible for identifying groups that need assistance, allocating resources wisely, and ensuring that assistance reaches appropriate recipients adjusted to allocation, regulator and welfare indicators.

**Keywords: Distribution; Social Assistance.**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDISTRIBUSIAN  
BANTUAN SOSIAL SECARA BERKEADILAN  
(Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Di Kecamatan  
Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)**

Oleh:

*Muhammad Irnanda*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Arnanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021055

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

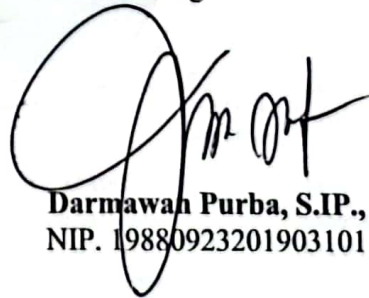
**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001

Pembimbing II



**Darmawan Purba, S.IP., M.IP**  
NIP. 198809232019031011

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**




**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

  
.....

**Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**

  
.....

**Penguji : Bendi Juantara, S.IP., M.A.**

  
.....



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 196108071987032001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Iranda  
NPM 1816021055

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Irnanda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Juli 2000. Peneliti merupakan putra kedua dari 3 bersaudara dari Ibu Mardalena dan Ayah Imran. Peneliti memiliki seorang kakak perempuan bernama Diah Irmalinda dan Adik yang bernama Ira Aliya Zaema.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Pembina Menggala yang diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 01 Ujung Gunung Ilir pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 2 Menggala pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Menggala pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Peneliti melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri Peneliti. Pada tahun 2018-2019 Peneliti menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai Anggota . Demikian serangkaian aktivitas Peneliti di masa perkuliahan. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Peneliti yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.



## **MOTTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama  
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

**(HR. Tirmidzi)**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)**

*“Do it or not. there is no such thing as trying”*

**(Chief, The Empire Strikes Back)**

“Perubahan tidak akan datang dari kaki yang diam”

**(Muhammad Irnanda)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Mardalena dan Imran (Alm)

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasmu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung)** ”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan untuk membawa jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomor satu.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Pembimbing Akademik (PA).
8. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Peneliti dalam proses Penelitian skripsi Peneliti, sehingga skripsi Peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Peneliti dalam proses Penelitian skripsi Peneliti, sehingga skripsi Peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan.
10. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Peneliti sehingga saat ini skripsi peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti.
12. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih sudah bersedia direpotkan

dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.

13. Anggota Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
14. Kedua Orangtua tercinta, Ibu Mardalena dan Ayah Imran (Alm). Terimakasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan peneliti insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Ibu dan Ayah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah, serta ilmu yang ku dapat dari pendidikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah bagi Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Ibu dan Ayah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Ibu dan Ayah tercinta.
15. Untuk Wina Fadhilah, Terima kasih telah menemani dan kebersamai dalam segala hal dari awal hingga akhir. Terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan. Maaf atas segala hal yang belum dapat dipenuhi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang sampai tiba waktunya.
16. Untuk teman-teman mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2018. Terima kasih atas rasa peduli kalian kepada saya, terima kasih atas dukungan, cacian dan makian kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Kalian yang terbaik dari yang terbaik. Semoga selalu sehat dan diberi umur yang panjang sahabatku agar kedepannya kita dapat saling membantu dalam segala hal.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Peneliti

**Muhammad Irnanda**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Manfaat praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Teori Peran .....	22
1. Konsep Peran .....	22
2. Dimensi Pada Konsep Peran .....	25
3. Jenis Konsep Peran .....	26
4. Aspek-aspek Pada Konsep Peran .....	27
5. Teori Peran Menurut Ahli .....	28
C. Konsep Bantuan Sosial .....	28
1. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial .....	30
2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Sosial .....	31
D. Pengawasan .....	32
1. Pengertian Pengawasan .....	32

2. Tujuan Pengawasan .....	33
E. Covid-19 .....	34
F. Kerangka Pemikiran .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39
1. Data Primer .....	39
2. Data Sekunder .....	39
D. Penentuan Informan .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Observasi .....	41
2. Wawancara .....	42
a. Wawancara Terstruktur .....	42
b. Wawancara Tidak Terstruktur .....	42
3. Dokumentasi .....	43
F. Teknik Pengolahan Data .....	43
1. Editing Data .....	43
2. Interpretasi Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data .....	43
2. Display Data (penyajian data) .....	45
3. Penarikan Kesimpulan .....	45
H. Teknik Keabsahan Data .....	46

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan Tulang Bawang .....	48
1. Profil Dinas Perpustakaan Tulang Bawang .....	48
2. Program-Program SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung .....	49
a. Program pemberdayaan sosial Penanggulangan kemiskinan .....	49
b. Pemberdayaan Keluarga .....	50



c. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat .....	51
d. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial .....	51
e. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak .....	52
B. Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung .....	52
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung .....	54

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	58
B. Pembahasan .....	74

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	19
4.1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung .....	52
5.1 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2019 .....	65
5.2 Indikator Penerimaan Bantuan Sosial <i>Covid-19</i> Kecamatan Menggala Tahun 2019 .....	65
5.3 Dokumentasi Penerimaan Bantuan Sosial <i>Covid-19</i> Kecamatan Menggala .....	81

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prinsip Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia merupakan suatu bagian dari strategi pemerintahan untuk dapat melaksanakan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahannya. Pemerintahan Daerah merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah Daerah dalam perencanaan suatu pembangunan di masyarakat baik itu dalam bentuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Wijaya, 2020).

Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik didalam interen birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). Pemerintahan Daerah merupakan koordinator atau pimpinan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan di wilayah kerja Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai seorang koordinator atau pemimpin Pemerintahan Daerah mempunyai banyak peran dalam kepemimpinannya antara lain sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah dan peran sebagai komunikator (Ginanjari, D, 2020).

Virus Corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan salah satu virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Corona Virus Disease 2019*. Corona virus tersebut menyebar dengan mudah diantara orang-orang yang berada dalam kontak dekat, atau melalui batuk dan bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi menderita gejala mirip flu ringan, tetapi beberapa menjadi sakit parah dan bahkan meninggal. Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia” (Alamsyah, S, 2020).

Dalam perkembangannya, wabah penyakit Covid-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, hingga April 2020 telah menyebar hingga ke-210 negara yang ada di Dunia. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai 2,7 juta di seluruh dunia dimana Amerika Serikat, Spanyol dan Italia menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan China yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini (Nurfurqon, 2020).

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengemudi ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian (Ni Nyoman. P, 2020).

Khususnya di Indonesia Pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 Pemerintah akan memberikan beberapa

jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus pandemik corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat (Ihsannudin, 2020).

Bantuan Sosial atau Bansos adalah salah satu paket bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud kehadiran Pemerintah kepada masyarakat. Bansos dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos juga dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya ada terdapat bantuan untuk lembaga non Pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, Bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang. Bantuan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan

meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, dimana pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin (Yosph. P, 2020).

Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda . Melalui jaringan kerja hingga ke tingkat RW/RT serta pemantuan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam penyaluran bantuan sosial ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan dobel. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid19. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda (Agung, 2020).

Pengawasan yang dilakukan tentunya harus dilakukan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang baik. Selain itu, melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi antara lain kesalahan dalam pekerjaannya, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya. Akan tetapi pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan ditujukan agar



dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu dibutuhkan juga pengawasan yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak positif untuk perkembangan dan perubahan yang lebih baik (Jospriady, 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Peran instansi tertentu seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial yang ada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran (Purnia. S. D, 2019).

Terdapat Undang-Undang yang mengatur penyaluran bantuan pemerintahan khususnya yang ada di Kecamatan Menggala yaitu merujuk pada Undang-Undang Desa yang didasarkan pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah khususnya dari bagian terkecil suatu organisasi pemerintah mempunyai peran dan kedudukan

yang sangat penting dalam kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat (Rahmatullah. S, 2019).

Berdasarkan studi lapangan serta pemberitaan, permasalahan dan penyelewengan pendistribusian bansos tidak tepat sasaran kepada masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah karena program bansos Covid-19 seperti BLT dana desa yang memakai kouta, yang berarti tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial, minimnya informasi mengenai data-data yang sudah menerima bantuan dan tidak transparan menjadi polemik masyarakat. Pemerintah harus lebih transparan untuk bansos ini, karena Masyarakat melihat dan merasakan pilih kasih karena tidak semua masyarakat yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan tersebut, program bansos yang ada dari pemerintah dalam prosesnya dan realisasi dilapangan masih sering bermasalah, di Kecamatan Menggala dalam pendistribusian, masih ada masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima, seperti terjadi kasus, sama-sama terdata di DTKS Kemensos sebagai penerima BLT, yang satunya mendapat bantuan tetapi satunya lagi belum menerima, tentu ini menyebabkan paket bansos tidak tepat sasaran. Pemerintah Daerah khususnya yang ada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bertugas untuk dapat mengatur di setiap wilayah, serta pembinaan dalam hal pendataan dan pendistribusian bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat di wilayahnya. Peran Pemerintahan Daerah sangatlah penting dalam pengawasan pendistribusian bansos secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena Pemerintahan Daerah lebih

mengetahui secara pasti data penduduk terdampak Covid-19 yang ada diwilayahnya sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan penyalurannya diterima oleh masyarakat yang layak untuk menerima bansos tersebut (Santoso, 2019).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait kondisi lapangan dengan topik yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam proses pendistribusian bantuan sosial secara berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses pendistribusian bantuan sosial secara berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami keilmuan tentang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada analisis peran pemerintah daerah dalam pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 secara berkeadilan.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Akademisi: penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai analisis peran pemerintah daerah dalam proses pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 secara berkeadilan.
- b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi kepada masyarakat itu sendiri dalam memberikan dan menerima respon terhadap peneliti terkait masalah dan kondisi penggunaan aplikasi sebagai salah satu sarana pendidikan khususnya di kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA Tahun Ajaran 2021/2022.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta informasi dalam menganalisis tentang peran pemerintah daerah dalam pendistribusian bantuan sosial secara berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021). Penelitian ini dapat dilakukan secara berulang

dengan menggunakan objek serta menggunakan sekolah yang berbeda akan tetapi dapat menggunakan analisis dan metode yang sama. Selanjutnya penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan mahasiswa, dan hasilnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menambah literatur dan wawasan dalam proses penelitian ini. Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi harus sesuai dan dapat mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian mencakup teori, konsep-konsep, analisis, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik peneliti yaitu terkait masalah “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”.

Penelitian tentang peranan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial dengan menggunakan prinsip berkeadilan pada masyarakat terdampak Covid-19 sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena penyelewengan dan kurang transparansi pendistribusian bantuan sosial masih banyak terdapat kesalahan dan kurang tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial akan lebih efektif jika Dinas Sosial mampu menjamin terlaksananya penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial

harus lebih proaktif menyinergikan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bantuan sosial termasuk Perum Bulog terhadap seluruh jenis bantuan sosial sehingga dapat menjamin efektivitas kerja dari Dinas Sosial. Selain itu, salah satu hal yang penting terkait penyaluran bantuan sosial adalah Dinas Sosial wajib *mengupdate* dan memperbaiki data secara terus-menerus agar data keluarga penerima bantuan sosial semakin sinkron dan valid dengan data yang telah ada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial sehingga akan tepat (Mardiasmo, 2009).

Data yang telah didapatkan tersebut akan dilaporkan kepada pihak Dinas Sosial lalu akan diteruskan kepada pihak Kementerian Sosial untuk dilakukan pengolahan data melalui Pusdatin Kementerian Sosial. Namun, pemutakhiran data penerima bantuan sosial ternyata membutuhkan persetujuan *update* DTKS dari Kementerian Sosial memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, adanya kendala Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat dikarenakan kurangnya pendataan yang lengkap seperti calon penerimanya sudah meninggal atau sudah pindah (Haryatmoko, 2011).

Pemahaman yang harus digaris bawahi dari perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya terletak pada objek penelitian dan peraturan pemerintah tiap desa khususnya di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang juga berbeda. Untuk itu peneliti memilih beberapa penelitian yang dianggap relevan dan dapat membantu peneliti dalam proses penelitian dan

pembahasan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Pertama**, (Namira Okita Zahra Siregar, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah wabah yang sedang mengkhawatirkan seluruh dunia. Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu pemulihan dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdampak Covid-19, faktor yang menghambat peranan serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyediakan metode pengumpulan data, yaitu fakta dan penjelasan data yang terungkap di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling dan snowball sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota tebing Tinggi dalam melakukan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 di Kota Tebing Tinggi sudah baik namun belum optimal. Pendataan bagi masyarakat sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang telah ditentukan



merupakan hal yang paling penting dalam mencapai penyaluran yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain informasi dan data pribadi KPM tidak lengkap. Selain itu juga adanya data yang tidak diperbarui juga menjadi kesulitan penyaluran. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap penyaluran serta adanya hambatan internal yakni bahan makanan dari bantuan sosial yang tidak dapat tahan lama. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan perbaikan sistem, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi atau menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial.

**Kedua**, (Saputri dan Imelda Tri, 2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian ini menyatakan bahwa di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi masalah dunia. Di Indonesia banyak dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 adalah perekonomian. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada, salah satunya refocusing Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya ditujukan untuk pembangunan dan pembangunan desa, dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dimana dana desa diatur dan dikelola oleh desa berdasarkan kewenangan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Ada 3 indikator yang digunakan menurut Levinson dalam Soekanto yaitu, Norma, Individu, dan Struktur Sosial Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang secara kualitatif dari data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan 1 informan kunci dan 4 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari 3 indikator yaitu masih ada mekanisme yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti tidak adanya relawan desa. Tapi di sini pemerintah desa menggantikan RT/RW. Dan masih ada kendala dalam pencairan dana, terkadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pemerintah desa masih kurang efektif terhadap masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.

**Ketiga,** (Achmad Fathoer Choer, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini di tunjukan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil sumber data berupa Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah, Literatur buku, dan situs web resmi. Selanjutnya, diketahui bahwa penanganan covid-19 di tingkat daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing seperti contoh di Sukabumi mengeluarkan surat edaran edaran Nomor 440/1512/ Humpro 2020 tentang kepatuhan dalam pelaksanaan protocol Kesehatan, di Denpasar membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dan di Medan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 188.44/47.K/III/2020, tanggal 31 maret 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam menjamin kesejahteraan rakyat pemerintah daerah mengeluarkan Bantuan Sosial baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi Pendidikan. Berdasarkan penelitian tersebut yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah bahwa dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa *pandemic Covid-19*, Pemerintah daerah perlu memastikan dan memantau dalam setiap bantuan sosial yang diberikan agar proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

**Keempat,** (Yohanes Susanto, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”. Penelitian ini membahas tentang kasus pandemi Covid 19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul ditengah masyarakat, tak dapat dipungkiri jika pandemi covid 19 telah hampir melumpuhkan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat

penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek dan menyebar hingga ke berbagai daerah seperti halnya masuk ke kota Bengkulu. Dengan adanya pandemi covid 19 ini sehingga pemerintah di Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar dari rumah bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan covid -19, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, pemberlakuan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar.

Di Indonesia sendiri dengan adanya pandemi covid-19 hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan pengangguran dan angka kemiskinan meningkat dimana para pelaku UMKM memutuskan hubungan kerja karyawannya (PHK) sebagai antisipasi penutupan usaha dalam jangka waktu yang belum ditentukan, tidak berhenti disini saja para pekerja sektor informalpun begitu sangat dirugikan akibat pandemi covid-19 ini. Maka dari itu sebagai bentuk usaha dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah menyiapkan dana ratusan trilliun guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, terutama untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Beberapa program misalnya pemerintah membagi dua kategori yaitu program non-reguler dan program reguler. Program reguler seperti bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako, bantuan sosial tunai dan pembebasan biaya listrik sedangkan bantuan dalam bentuk program reguler meliputi kartu prakerja, penambahan peserta program keluarga berencana dan kartu sembako.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data diperoleh dengan primer dan data sekunder berupa artikel, jurnal, berita, dan studi literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan penyaluran program bansos kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Desa Panorama Kota Bengkulu melalui peran pemerintah kecamatan yang bekerjasama dengan jajarannya antara lain RT, RW dan organisasi kepemudaan dan ketertiban masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan tepat sasaran.

**Kelima**, (Binsar Pandapotan Hasibuan, 2020) pada penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran serta Pemerintah Kota Medan dalam menyalurkan Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Medan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif. Sedangkan Sumber Data dalam penelitian adalah pegawai Dinas Sosial Kota Medan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik “Purposive Sampling”. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen serta mencatat dan merekam. Teknik Analisa Data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 ini.

Hendaknya kedepan dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Dukungan semua masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 agar segera berakhir sangat perlu seperti menjaga pola hidup 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) Demikian yang dapat penulis simpulkan dalam rangka penyusunan Jurnal Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

<b>Ket.</b>	<b>(Namira Okita Zahra Siregar, 2020)</b>	<b>(Saputri dan Imelda Tri, 2022)</b>	<b>(Achmad Fathoer Choer, 2020)</b>	<b>(Yohanes Susanto, 2022)</b>	<b>(Binsar Pandapotan Hasibuan, 2020)</b>
Topik Penelitian	Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19	Analisis Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020
Jenis Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Kualitatif Deskriptif	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif
Landasan Konsep dan Teori	Teori Peran, Koneksi Bansos	Teori Peran, Peranan Pemerintah Daerah, Bantuan Sosial	Kesejahteraan Masyarakat, Peranan Pemerintah, Jaminan Sosial	Kebijakan Program Bantuan, Bansos Masyarakat, Peran Pemerintah	Teori Peran, Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Peranan Pemerintahan Daerah

Fokus Penelitian	<p>Pandemi Covid-19 adalah wabah yang sedang mengkhawatirkan seluruh dunia. Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu pemulihan dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdampak Covid-19, faktor yang menghambat peranan serta upaya dalam mengatasinya.</p>	<p>Berdasarkan penjelasan latar belakang yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Ada 3 indikator yang digunakan menurut Levinson dalam Soekanto yaitu, Norma, Individu, dan Struktur Sosial Masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini di tunjukan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa pandemi Covid-19. Penanganan kasus Covid-19 harus dianggap serius dan terkontrol karena pentingnya tepat sasaran penerimaan bantuan merupakan hal yang paling utama.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kasus pandemi Covid 19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul ditengah masyarakat, tak dapat dipungkiri jika pandemi covid 19 telah hampir melumpuhkan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek dan menyebar hingga keberbagai daerah seperti halnya masuk ke kota Bengkulu.</p>	<p>Kebijakan yang tidak disertai dengan pengawasan penanganan di lapangan dan kurang terkoordinasi. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak merata, baik dalam hal waktu, kualitas barang, sasaran/ masyarakat penerima maupun wilayah distribusi, kurang jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan, masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, ada yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, dan ada yang tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.</p>
Kesimpulan	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota tebing Tinggi dalam melakukan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 di Kota Tebing Tinggi sudah baik namun belum optimal. Pendataan bagi masyarakat sesuai dengan kriteria dan karakteristik</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari 3 indikator yaitu masih ada mekanisme yang belum</p>	<p>Dalam menjamin kesejahteraan rakyat pemerintah daerah mengeluarkan Bantuan Sosial baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi Pendidikan. Berdasarkan penelitian tersebut yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah bahwa dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa <i>pandemic Covid-19</i>, Pemerintah daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran program bansos kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Desa Panorama Kota Bengkulu melalui peran pemerintah kecamatan yang bekerjasama dengan jajarannya antara lain RT, RW dan organisasi</p>	<p>Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 ini. Hendaknya kedepan dalam mengambil</p>

	<p>yang telah ditentukan merupakan hal yang paling penting dalam mencapai penyaluran yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain informasi dan data pribadi KPM tidak lengkap. Selain itu juga adanya data yang tidak diperbarui juga menjadi kesulitan penyaluran. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap penyaluran serta adanya hambatan internal yakni bahan makanan dari bantuan sosial yang tidak dapat tahan lama. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan perbaikan sistem, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi atau menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial.</p>	<p>dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti tidak adanya relawan desa. Tapi di sini pemerintah desa menggantikan RT/RW. Dan masih ada kendala dalam pencairan dana, terkadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pemerintah desa masih kurang efektif terhadap masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.</p>	<p>perlu memastikan dan memantau dalam setiap bantuan sosial yang diberikan agar proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.</p>	<p>kepemudaan dan ketertiban masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan tepat sasaran.</p>	<p>kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Dukungan semua masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 agar segera berakhir sangat perlu seperti menjaga pola hidup 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) Demikian yang dapat penulis simpulkan dalam rangka penyusunan Jurnal Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020.</p>
--	--	---	---	--	---

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, Desember 2022, 13.00*



Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada peran pemerintah daerah terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yaitu Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan objek penelitian di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Dinas Sosial rujukan Kementerian Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Teori Peran**

### **1. Konsep Peran**

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena sifat peran sendiri yang mengandung kewajiban seseorang yang harus dijalani dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999).

Peranan adalah perangkat harapan - harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari pola - pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat (Rahardjo, 2006).

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Menurut Soejono Soekanto pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah – pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soekanto (2001) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dimana peranan merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan (status). Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu Kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Menurut Horton (1999) Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Menurut Veithzal Rivai (2004) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005) peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan

karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

## **2. Dimensi Pada Konsep Peran**

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan (Nugroho, 2016).

### **3. Jenis Konsep Peran**

Peran dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

#### **a. Peran Aktif**

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

#### **b. Peran Partisipatif**

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### **c. Peran Pasif**

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam

mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran dan fungsinya masing masing untuk menjalankan berbagai peran yang harus ia kerjakan dan lakansanakan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan (Kusuma, 2016).

#### **4. Aspek-Aspek Pada Konsep Peran**

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Alakhiri, 2020).

Peranan adalah perangkat harapan - harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari

pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Yusuf,2020).

## **5. Teori Peran Menurut Ahli**

Sementara itu, Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial.

1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak sosial.
2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat terkait hak-hak yang harus diterima oleh warga negara serta keadilan penerimaan bantuan secara merata dan terarah.
3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial khususnya pada penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak *pandemic Covid-19*.

## **C. Konsep Bantuan Sosial**

Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Menurut Wikipedia Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Husin, 2020).

Bantuan Sosial adalah “transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah dibidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif (Taqwadin, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (Moutia, 2017).

Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau



masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Intan, 2017).

### **1. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial**

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuai dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada poin 1 diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 meliputi: Memiliki identitas yang jelas; dan Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kriteria sesuai tujuan

penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: Rehabilitasi sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial, Jaminan sosial, Penanggulangan kemiskinan, dan Penanggulangan bencana (Fitri, 2017).

## **2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Sosial**

- a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan
- f. kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- g. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- h. Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati (Elison. D, 2021).

## **D. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Menurut Arifiansyah (2013) Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam rangka peningkatan efektivitas aparatur pemerintah, sehingga dengan demikian perlu peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam tubuh aparatur pemerintah secara terus menerus dan menyeluruh untuk mencegah atau sekurang-kurangnya memperkecil terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan pengawasan di perlukan pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi ataupun pelayanan yang akan di awasi, tentu juga di perlukan kinerja yang baik dari pengawai.

Pengawasan menjadi sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan dari pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam

organisasi di pemerintahan pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintahan. Seorang pengawas harus bisa melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan atau pegawai yang bertujuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan baik pada waktu pekerjaan sedang dilaksanakan maupun sesudah pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dimana pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja yang dimiliki oleh seorang pegawai atau seorang bawahan, serta untuk mencegah terjadinya masalah-masalah dari kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan menurut William N. Dunn (1999) Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

## **2. Tujuan Pengawasan**

Tindakan pengawasan dalam organisasi tentu saja mempunyai tujuan. Tujuan utama Pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Adapun beberapa tujuan dari dilaksanakannya pengawasan adalah :

- a. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- b. Memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah

- c. Menjalankan koordinasi aktivisasi
- d. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi “pemerintah”.
- e. Menjamin terwujud kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan (Handoko, 2009).

### **E. Covid-19**

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut *Covid-19*, virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut sampai pada kematian. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah China lainnya bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara diluar negeri menepakan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk pencegahan virus corona (Rosadi. C, 2021).

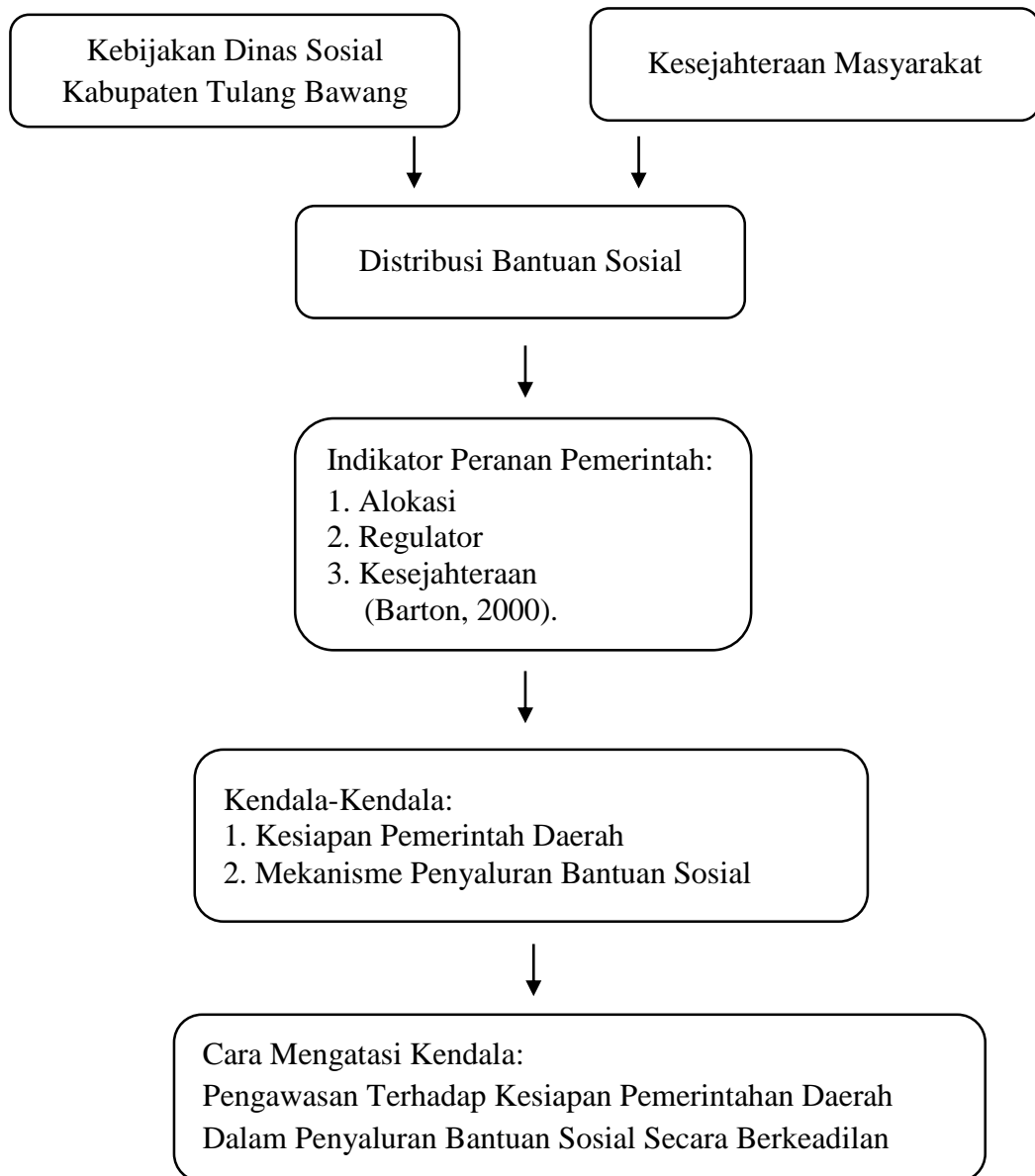
Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya mereka memilih pulang

kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan (Khoiriyah, 2020).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan observasi terdapat permasalahan yang terjadi yaitu kurang tepat sasaran pada alokasi distribusi penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terkena dampak *pandemic Covid-19* khususnya di daerah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Peranan pemerintah dalam proses distribusi khususnya penyaluran bantuan sangatlah penting karena pendataan yang akurat terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan terdapat pada peraturan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan yang serius pada pendistribusian bantuan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan secara transparan dan terarah melalui tingginya pengawasan demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang terkena dampak *pandemic Covid-19*.

Berdasarkan penjelasan permasalahan dan teori di atas, maka dapat dibuat sebuah kerangka berfikir yang berfungsi untuk menjelaskan alur pemikiran yang terhubung antara konsep satu dengan konsep lainnya serta bertujuan untuk dapat memberikan asumsi mengenai hubungan variabel-variabel yang akan diteliti terkait judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”. Kerangka berfikir tersebut dapat di lihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:



**Gambar 2.1 Bagan kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Loncoln and Guba penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat *naturalistic*. Penelitian ini bertolak dari paradigma *naturalistic*, bahwa “*kenyataan itu berdimensi jamak*” (Sukmadinata, 2013). Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Selain itu penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.

Analisis Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mencari menginterpretasi hubungan atau pengaruh antar satu variabel dengan variabel yang lain. Pembatasan penelitian ini dimaksudkan pada “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”.



## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan salah satu batasan penting dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Hal ini untuk menganalisis ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan memegang peranan yang penting dalam mengarahkan jalannya suatu penelitian. Agar dapat mempermudah dalam memberikan pemahaman dan mengarahkan penelitian yang dilakukan terkait “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”, maka yang menjadi fokus penelitian ini telah disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh Barton (2000) dalam leksono (2009) yang menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial. Pernyataan di atas diperjelas dengan pernyataan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran alokasi sumber daya mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak sosial.
2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat terkait hak-hak yang harus diterima oleh warga negara serta keadilan penerimaan bantuan secara merata dan terarah.

3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial khususnya pada penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemic Covid-19.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting karena sumber data dapat digunakan untuk menunjang dan mendukung hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei dan observasi. Adapun sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini bersumber melalui data yang didapat dari responden yang akan diteliti secara langsung melalui observasi, survei, dan wawancara (Hermawan, 2006).

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan atau seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2000). Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu data yang dikumpulkan dari proses wawancara yang sudah di jawab oleh perwakilan beberapa instansi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial rujukan dari Kementerian Sosial terkait

bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021).

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan suatu penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau sebagainya (Amirudin, dan Askin, 2003). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui mencatat data yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak yang berhubungan dan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **D. Penentuan Informan**

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi sebagai pelaku ataupun orang lain yang mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Informan (narasumber) penelitian sebagai salah satu instrumen penelitian akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti terkait masalah “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”.

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Teknik pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih informan secara sengaja sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan sebelumnya pada penentuan informan. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai kriteria tersendiri untuk dapat memilih informan, informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai pemerintah aktif yang ada di Kantor Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Pegawai pemerintah aktif yang ada di Instansi Dinas Sosial sesuai rujukan dari Kementerian Sosial
3. Bertugas khusus dalam mendistribusikan bantuan sosial
4. Objek Penelitian disesuaikan hanya pada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka untuk mengumpulkan data digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan penentuan informan.

##### **1. Observasi**

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengamati dan menginterpretasi tentang bagaimana “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)”.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui serta mendapatkan kesimpulan yang jelas terkait “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)” dari tanggapan responden dengan jumlah respondennya yang lebih sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan bertatap muka maupun melalui telepon.

### a. Wawancara Terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan untuk

dapat lebih cepat dalam menemukan inti dari permasalahan yang di dasarkan pada tanggapan responden yang telah di pilih oleh peneliti.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar. Pada teknik ini, peneliti diharuskan untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis maupun dokumen yang ada pada responden. Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto atau kegiatan-kegiatan atau peristiwa pada saat penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk memepermudah mengecek suatu kebenaran dari peristiwa sehingga suatu penelitian menjadi valid adanya.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergalil dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### **1. Editing Data**

Editing data atau pemeriksaan data merupakan suatu proses untuk memilah milah data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian relevansinya dengan data yang lain (Achmadi, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing data terhadap hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi terkait peran Pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial

di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung masyarakat terdampak Covid-19 secara berkeadilan.

## **2. Interpretasi Data**

Interpretasi data penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari data yang diolah dengan berbagai macam kriteria. Interpretasi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menemukan jawaban dan arti dari sebuah data (L. R. Gay, 1996). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interpretasi dari data yang dihasilkan dari pengumpulan data dan editing data terkait peranan pemerintah daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial secara berkeadilan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dapat digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara (Milles dan Huberman, 1992). Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan

semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data (Moeleong, 2005).

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2009).

## **2. Display Data (penyajian data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan hasil wawancara, pengamatan lapangan dan sebagainya. Melalui penyajian studi pengamatan tersebut, maka hasil terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



## H. Teknik Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Ada empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data (*Data Triangulation*). Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.

1. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktifitas sama.
2. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
3. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

Dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset yang dilakukan oleh penel.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung**

##### **1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Fungsi dan uraian Tugas Unsur-unsur Dinas Sosial disebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan dibidang sosial, meliputi Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial Dan Pelayanan Serta Pemberdayaan Sosial. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Alamat penempatan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang berada di Komplek Perkantoran Pemda, Jl. Cemara, South Menggala, Menggala, Tulang Bawang Regency, Lampung, 36611.

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung yaitu sebagai berikut:

**Visi :**

“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFISIONAL”.

**Misi :**

1. Mendorong dan mendukung Perluasan dan Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Masyarakat dan Pemerintah guna meningkatkan kesetiakawanan Sosial sebagai upaya Pemberdayaan, Penyandang, Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **2. Program-Program SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung**

- a. Program pemberdayaan sosial Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus

dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

#### b. Pemberdayaan Keluarga

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk kedalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

### c. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

### d. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

e. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

**B. Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang**

**Lampung**

Di bawah ini merupakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan jabatan yang masih aktif di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung**

No	Jabatan	
1	<b>Plt. Kepala Dinas</b>	
	<b>Nama</b>	BINHAR MS, S.E.
	<b>NIP.</b>	19720416 199402 1 001
2	<b>Sekretaris</b>	
	<b>Nama</b>	BINHAR, M.S. S.E.
	<b>NIP.</b>	19660604 198603 1 006
3	<b>Kasubbag UK</b>	
	<b>Nama</b>	MEILINA, S.E., M.M.
	<b>NIP.</b>	19780520 200701 2 012

4	<b>Kasubbag KEU</b>	
	<b>Nama</b>	HUSIN TORAYA, SE., M.M
	<b>NIP.</b>	19740822 199603 1 001
5	<b>Kassubag BIPRAM</b>	
	<b>Nama</b>	EVAN NOPRIANDO, S.Sos., M.M.
	<b>NIP.</b>	19801125 201001 1 011
6	<b>Kabid Linjamsos</b>	
	<b>Nama</b>	USMAN, S.Sos.
	<b>NIP.</b>	19630703 198603 1 017
7	<b>Kasi Perlindungan Sosial Korban BA &amp;BS</b>	
	<b>Nama</b>	REPIYANA, S.E.,M.M.
	<b>NIP.</b>	19750727 200701 2 009
8	<b>Kasi Jaminan Sosial Keluarga</b>	
	<b>Nama</b>	DIAH KESUMA ASIH, S.E., M.M.
	<b>NIP.</b>	19841215 200501 2 005
9	<b>Kabid Penanganan Fakir Miskin</b>	
	<b>Nama</b>	Drs. EDI SUPRIADI
	<b>NIP.</b>	19630615 198303 1 009
10	<b>Kasi Penanganan Fm Perdesaan Dan Pesisir</b>	
	<b>Nama</b>	ERNA SARI, S.E.
	<b>NIP.</b>	19760613 200604 2 021
11	<b>Kasi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan</b>	
	<b>Nama</b>	YUNANI, S.E.
	<b>NIP.</b>	19660912 200604 2 003
12	<b>Kabid Pemberdayaan Sosial</b>	
	<b>Nama</b>	GENTAR ALAM, S.Ag.
	<b>NIP.</b>	19711101 200801 1 011
13	<b>Kasi Pemberdayaan Sosial &amp; Pengelolaan SDBS</b>	
	<b>Nama</b>	GUSTINA MAYA SARI, S.H., M.M.
	<b>NIP.</b>	19840817 200902 2 016



14	<b>Kasi Pemberdayaan Sosial &amp; Pengelolaan SDBS</b>	
	<b>Nama</b>	GUSTINA MAYA SARI, S.H., M.M.
	<b>NIP.</b>	19840817 200902 2 016
15	<b>Kasi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan RS</b>	
	<b>Nama</b>	DESTRI OKTAVIA, S.E.
	<b>NIP.</b>	19851022 201001 2 002
16	<b>Kabid Rehabilitasi Sosial</b>	
	<b>Nama</b>	ROSAIDAH, S.Sos.M.M.
	<b>NIP.</b>	19710902 199303 2 001
17	<b>Kasi Rehabilitasi Anak Penyandang Disabilitas Dan Lansia</b>	
	<b>Nama</b>	APRINA SARI, SH.,M.M.
	<b>NIP.</b>	19870411 20011 01 2 005
18	<b>Kasi Rehabsos Korban Penyalahgunaan Nafza Tunasusila DAN PC</b>	
	<b>Nama</b>	ANNA IRAWATI, S.H.
	<b>NIP.</b>	19830809 200701 2 002

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, diolah oleh peneliti, excel 2013, Juli 2023, 17.25

### **C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Lampung**

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dengan baik maka Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan nasional;
- 2) Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten;
- 4) Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten;
- 5) Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
- 6) Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
- 7) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten;
- 8) Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;
- 9) Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten;
- 10) Pengembangan dan pendayagunaan PSKS kala kabupaten;
- 11) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten;
- 12) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala kabupaten;
- 13) Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur tembusan kepada Menteri Sosial;

- 14) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;
- 15) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten;
- 16) Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten;
- 17) Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala kabupaten;
- 18) Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten;
- 19) Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan staya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri sosial;
- 20) Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten;
- 21) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala kabupaten;
- 22) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten;
- 23) Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- 24) Penanggulangan penyelenggaraan dari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat kabupaten;
- 25) Penanggulangan korban bencana berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 26) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;
- 27) Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;
- 28) Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan;
- 29) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian skala kabupaten;

- 30) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten;
- 31) Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI;

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Secara Berkeadilan (Studi Pada Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak *Covid-19* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Tahun 2021)” yaitu pemerintah telah menjalankan proses pendistribusian bantuan sosial di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2021 dengan upaya besar untuk mencapai keadilan. Melalui strategi dan mekanisme yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tersebar secara adil kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sesuai dengan indikator alokasi, regulasi, demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang harus diajukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih belum mencapai kepuasan dengan taraf maksimal.

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan indikator

yang berbeda yang dapat memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Penggunaan indikator yang berbeda dapat membuka pandangan yang lebih luas terhadap aspek-aspek seperti keragaman sosial, kebutuhan yang spesifik, dan karakteristik unik masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pendistribusian bantuan sosial guna mencapai tujuan keadilan yang lebih inklusif dan menyeluruh.

2. Bagi Instansi pemerintahan Dinas Sosial, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai sarana bahan evaluasi terkait pendistribusian bantuan sosial secara berkeadilan yang ada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agung, I. M. (2020). Memahami pandemi *Covid-19* dalam perspektif psikologi sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*.
- Alamsyah S, (2020). *Membumikan Pelajaran Akuntansi. Buku Pintar Akuntansi Dagang Untuk Orang Awam*. Bahlil
- Alakhiri, Yusuf. (2020). *Analisis Dampak Covid- 19 Bagi Perekonomian dan Sektor Perbankan Syariah*. Indonesia.
- Alakhiri, Yusuf. (2020). *Analisis Dampak Covid- 19 Bagi Perekonomian dan Sektor Perbankan Syariah Indonesia*.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faiz, Ahmad. (2020). Menteri Desa Pemerintah BLT dan Dana Desa Disalurkan Sebelum 24 Mei. Diakses 20 Mei 2020. [Nasional.tempo.co](http://Nasional.tempo.co)
- Fitri. (2017). *Pengaruh Keterlibatan Kerja Dan Loyalitas. Karyawan (Pada Karyawan Bank OUB Cabang Pekenbaru)*.
- Gay, L. R. (1996). *Education Research: Competencies for Analysis and Application*. Edisi ke-5.
- Ginancar. (2020). " *Penelitian Deskriptif Kualitatif* ". Gramedia Pustaka.
- Jospriady, (2020). Agung "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Puser Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Horton, Paul B. Terbitan: Erlangga, (1999). Institusi: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Haryatmoko, (2011). Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan. (2006). Penelitian Bisnis, Paradigma Kuantitatif, Cikal Sakti,. Grasindo. Arfani, Edith. 2007.
- Husin, Taqwaddin. (2020). Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. 21 April. Diakses 20 Mei 2020.
- Kusuma, Nugroho. (2016). Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura. Dinamika: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vo. 10 N0. 2.
- Kusuma. (2016). Asuhan Keperawatan Berdasarkan diagnosa Medis. Nanda Nicnoc. Jogjakarta: Mediactio Publishing.
- Leksono, SE. MS. (2009). Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional Malang. CV: Citra.
- Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Andi. Yogyakarta.
- Mutia, Intan Fitri. (2017). Analisis kebijakan publik. Bandar Lampung: AURA.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta. (2003).
- Nurfurqon, Ardika. (2020). "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara.
- Nugroho. (2016). E-Commerce Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Purnia, D. S. (2018). Implementasi metode RAD pada Rancang Aplikasi BAN-SOS Ter Distribusi Berbasis Mobile.



- Purnomo, Diyan, Soeaidy, Mochammad Soleh., & Hadi, Minto. (2014). Analisis kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Malang (Studi pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2008 kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1), 43-44.
- Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Choresyo.
- Rahmatullah, S., Purnia, D. S., & Triasmoro, R. (2019). Analisis Kualitas Website Sekolah. North Jakarta Intercultural School.
- Santoso, A., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Dan. Disiplin Kerja Terhadap Kerja Karyawan Pada PT Pegadaian (Persero).
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan.*: Bumi Aksara. Jakarta. (2002).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taqwadin. 2020. *Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19*.
- Umar. (2000). *Riset Pemasaran Dan Penilaian Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wijaya, LD. 2020. *Survei Bansos di DKI*. Jakarta.
- Yusuf. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- YDP Rangga, H Herdi, A Rangga, EEK Goo. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

**Jurnal:**

Achmad Fathoer Choer. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19". 2020.

Binsar Pandapotan Hasibuan. "Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020". 2020.

Namira Okita Zahra Siregar. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara". 2020.

Saputri dan Imelda Tri. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu". 2022.

Yohanes Susanto. "Analisis Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu". 2022.

**Internet:**

<http://dinsos.tulangbawangkab.go.id>

[wikipedia.org](http://wikipedia.org)

[www.sippn.menpan.go.id](http://www.sippn.menpan.go.id)

<http://lapor.tulangbawangkab.go.id>